

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Berimbang Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Papua

Paulus Peka Hayon<sup>1\*</sup> Renita Nawang Fitry<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus

\*Korespondensi: [pauluspeka@unmus.ac.id](mailto:pauluspeka@unmus.ac.id)

**Abstrak:** Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana berimbang terhadap belanja modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, dan apakah dana berimbang dari alokasi umum dan alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal dan apakah pendapatan asli daerah dan dana berimbang dari alokasi umum dan alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Populasi penelitian berjumlah 29 Kabupaten dan Kota. Metode yang digunakan untuk memperoleh sampel adalah metode *nonprobability sampling* sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 116 digunakan pada penelitian ini. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yakni data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua dan Direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan (DJPK). Data dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji hipotesis dengan alat bantu analisis yakni aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal; karena nilai  $t_{hitung} -2.972 < t_{tabel} 1.708$  demikian pula dilihat dari nilai signifikansinya  $0,004 < 0,05$ . Hasil pengolahan data variabel Dana Berimbangan untuk alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal; karena nilai  $t_{hitung} -0,641 < t_{tabel} 1.708$  demikian pula nilai signifikansinya  $0,523 > 0,05$ ; sedangkan hasil pengolahan data Dana Berimbang untuk alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal; karena nilai  $t_{hitung} 2,295 > t_{tabel} 1.708$  demikian pula nilai signifikansinya  $0,024 < 0,05$ . Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dan dana berimbang untuk alokasi umum dan alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal karena nilai  $t_{hitung} 6,498 > f_{tabel} 2,76$  demikian pula nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$ .

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Berimbang, Belanja Modal.

**ABSTRACT:** *The effect of Regional Original Income and Balanced Funds on Regency and City Capital Expenditures in Papua Province. The aim of this research is to find out and analyze whether local original income has an effect on capital expenditure, and whether balanced funds from general allocation and special allocation have an effect on capital expenditure and whether local original income and balanced funds from general allocation and special allocation simultaneously have an effect on capital expenditure. The research population consisted of 29 districts and cities. The method used to obtain samples was a nonprobability sampling method so that the samples*

*obtained were 116 used in this research. The type of data in this research is secondary data, namely data from reports on the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget sourced from the Central Statistics Agency (BPS) of Papua Province and the Directorate General of Financial Balance of the Ministry of Finance (DJPK). Data were analyzed using descriptive statistical techniques, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, and hypothesis testing with analysis tools, namely the SPSS version 25 application. The research results found that Regional Original Income has no effect on Capital Expenditures; because the tcount value is  $-2.972 < t_{table} 1.708$  as can be seen from the significant value of  $0.004 < 0.05$ . The results of processing the Balanced Fund variable data for general allocation have no effect on capital expenditure; because the value of tcount is  $-0.641 < t_{table} 1.708$ , so is the significant value of  $0.523 > 0.05$ ; while the results of the Balanced Fund data processing for special allocations have a positive and significant effect on capital expenditure; because the value of tcount is  $2.295 > t_{table} 1.708$ , so is the significant value of  $0.024 < 0.05$ . The results of simultaneous hypothesis testing show that the variables of local original income and balanced funds for general allocation and special allocation have a positive and significant effect on capital expenditure because the t-count value is  $6.498 > f_{table} 2.76$  as well as the significant value of  $0.000 < 0.05$ .*

*Keywords: Original Regional Income, Balanced Funds, Capital Expenditure*

## **1. Pendahuluan**

Pelaksanaan otonomi daerah secara normatif ditujukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan adalah dengan dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui wadah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang diselenggarakan mulai dari tingkat Desa sampai dengan tingkat Kabuapten/Kota (Iqbal dan Halim, 2012). Pembangunan dapat berjalan dengan baik, jika anggaran pendapatan daerah dapat dialokasikan secara cermat sesuai anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan yang dibuat Pemerintah Daerah setiap tahun, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Jangka waktu APBD selama satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Sujarweni, 2015). Penyusunan APBD berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja. Anggaran berbasis kinerja mengutamakan hasil atau keluaran dari program dan kegiatan yang akan atau telah terukur (Haryanto, Sahmuddin dan Arifuddin, 2007). Anggaran disusun berdasarkan jenis pendapatan dan belanja (Arif, Muclis dan Iskandar, 2009). Sebelum anggaran belanja disusun terlebih dahulu disusun anggaran pendapatan; karena belanja bisa digunakan ketika sudah ada pendapatan. Pendapatan akan dialokasikan ke semua jenis belanja antara lain belanja modal.

Anggaran pendapatan atau pendapatan Negara terdiri dari penerimaan dalam Negeri yang terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan Negara bukan pajak. pendapatan lain berupa hiba (Arif, Muclis dan Iskandar, 2009). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dapat dikelompokkan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek terdiri atas pendapatan asli daerah, dana berimbang dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hasil pengolahan kekayaan daerah meliputi laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah atau BUMD atau laba penyertaan modal pada perusahaan swasta lainnya. Pendapatan daerah lain yang sah meliputi jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi atau penjualan atau pengadaan barang asset daerah, penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan (Haryanto, Sahmuddin dan Arifuddin, 2007)

Pendapatan daerah dari dana berimbang terdiri atas dana bagi hasil dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil meliputi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dan alokasi umum. Demikian pula dan alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penyusunan anggaran, pendapatan berupa pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana berimbang dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPD. sedangkan retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukas rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna/ pengguna barang dianggarkan pada SKPD

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali daerah (Haryanto, Sahmuddin dan Arifuddin, 2007 dan Arif, Muclis dan Iskandar, 2009 ). Belanja daerah dikelompokkan menjadi dua yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai khususnya pegawai

negeri sipil, belanja bunga bila pemerintah daerah mempunyai hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang, belanja subsidi bagi perusahaan atau lembaga tertentu, belanja hiba berupa uang atau barang kepada kelompok masyarakat tertentu, belanja bantuan sosial berupa uang atau barang untuk kesejahteraan masyarakat, belanja bagi hasil dari propinsi ke pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada pemerintahan desa, bantuan keuangan bersifat umum atau khusus dari pemerintah propinsi kepada pemerintah kabupaten atau dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, dan belanja tidak terduga yang tidak biasa terjadi yang tidak diperkirakan sebelumnya. Belanja langsung meliputi belanja pegawai honorarium atau upah, belanja barang dan jasa habis pakai atau sewa, dan belanja modal. Belanja modal merupakan belanja yang tidak habis satu tahun atau menghasilkan aset tetap pemerintah (Arif, Muclis dan Bactiar, 2009).

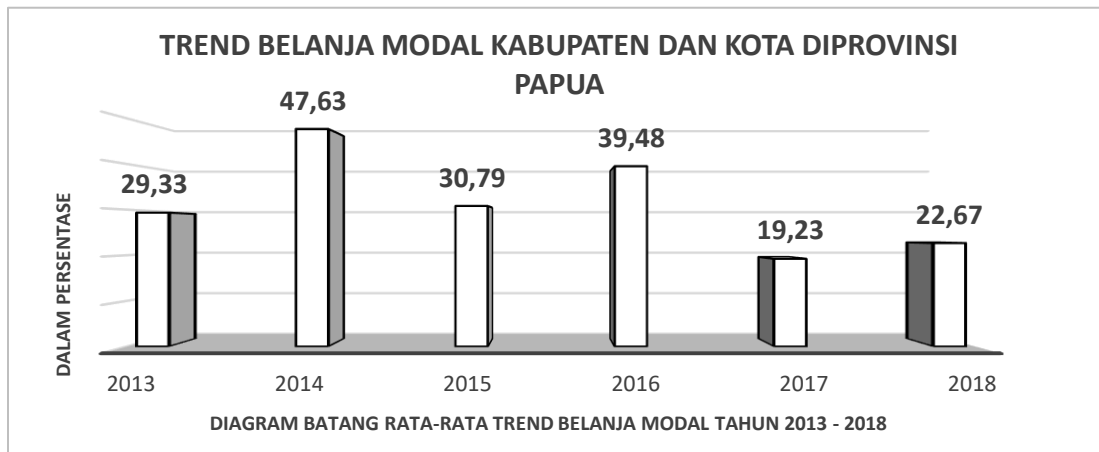
Belanja modal terdiri dari belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan dan aset tetap lainnya. Menurut Haryanto, Sahmuddin dan Arifuddin (2007), belanja modal itu pengeluarannya untuk pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangunan aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Sumber pendapatan daerah sesuai dengan undang-undang nomor 32/2004 yang dirinci dalam peraturan pemerintah nomor 24/2005, direvisi dengan peraturan pemerintah 77/2010 ( Halim dan Iqbal, 2012), meliputi: Pendapatan asli daerah terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; dan Pendapatan transfer, terdiri dari transfer pemerintah pusat – dana berimbang meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus; transfer pemerintah pusat lainnya meliputi dana otonomi khusus dan dana penyesuaian dan transfer pemerintah propinsi meliputi pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari uraian di atas, maka penelitian ini berfokus pada Anggaran Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Berimbang khusus alokasi dana untuk kegiatan umum dan alokasi dana untuk kegiatan khusus. Dari sumber pendapatan asli daerah dan dana berimbang sejauh mana pengaruhnya jika dialokasikan untuk belanja modal. Karena pembangunan secara fisik akan nampak jika melalui belanja modal.

Pembangunan akan tercapai sesuai cita-cita pemerintah daerah jika pengelolaan keuangan dari belanja modal dijalankan sesuai perencanaan. Pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2013–2016 Kabupaten dan Kota Provinsi Papua belum masuk dalam kategori optimal karena, ruang fiskalnya yang cenderung menurun dan dilihat dari proporsi belanja daerah Provinsi Papua yang masih cenderung dominan kepada belanja operasi artinya anggaran daerahnya banyak habis untuk belanja pegawai dan operasionalnya ketimbang belanja modal sehingga dapat dikatakan pengelolaan keuangan Propinsi Papua belum optimal (Bapenas,2016).

Pengelolaan keuangan Kabupaten dan Kota sangat fluktuatif selama 6 tahun terakhir belanja modal pada tahun 2013 sebesar 29,33%, tahun 2014 meningkat sebesar 47,63%, tahun 2015 menurun sebesar 30,79%, tahun 2016 meningkat sebesar 39,48%,pada tahun 2017 menurun sebesar 19,23%, tahun 2018 meningkat sebesar 22,67%. Selama 6 tahun rasio Belanja Modal tertinggi berada pada tahun 2014 sebesar 47,63% artinya pada tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi kenaikan belanja modal sebesar 18,63%, artinya ada peningkatan alokasi belanja modal karena belanja modal yang sifatnya *Multiyears* yaitu membutuhkannya beberapa tahun pembangunan baru bisa ditentukan pengalokasiannya, juga pertimbangan kapasitas fiskal atau penerimaan daerahnya. Trend belanja modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



**Gambar 1. Trend Belanja Modal Tahun 2013-2018**

Pembangunan Provinsi Papua itu belum sesuai harapan masyarakat karena indeks pembangunan khususnya indeks pembangunan manusia Indonesia pada tahun 2013–2018 mencapai 72,77%, hal tersebut tidak sebanding dengan angka indeks pembangunan manusia Provinsi Papua sebesar 57,25% (BPS 2020). Indeks pembangunan manusia merupakan indeks taraf penilaian kualitas hidup masyarakat terlihat dari kualitas kesehatan, Pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat dalam mencapai tingkat pendapatannya.

Indeks pembangunan manusia berkaitan dengan proporsi Dana Berimbang khususnya alokasi khusus terhadap Belanja Modal. Proporsi terhadap Belanja Modal di Papua hanya 30% artinya Provinsi Papua belum mencapai target rata-rata nasional sehingga pengelolaan keuangan daerahnya dianggap masih rendah. Karena indikator perencanaan anggaran yang berkualitas tercermin dari pada tingkat akurasi antara perencanaan dan realisasi capaian outputnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah untuk belanja modal dan seberapa besar pengaruh dana berimbang untuk belanja modal serta apakah dari kedua sumber pendapatan pemerintah tersebut ada pengaruhnya untuk belanja modal.

## **2. Metode**

Metode Penelitian ini adalah metode kuantitatif, dimana data penelitian berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik atau dengan kata lain, metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positisme digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014). Objek yang diteliti adalah Laporan keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua selama 4 tahun dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Menurut Prasetyo dan Jannah (2013), populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti. Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014 dan 2016). Populasi penelitian ini sebanyak 29 Kabupaten dan Kota. Sampel adalah bagian dari populasi dengan pengambilan sampelnya bisa menggunakan teknik probability atau nonprobability. Menurut Prasetyo dan Jannah (2013), sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Pada penelitian ini pengambilan sampel dengan teknik probability yakni sampling jenuh Sugiyono (2014), Jenis data pada penelitian ini ialah data sekunder yakni data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan. Rumus untuk menghitung rasio keuangan dapat dilihat pada di bawah ini:

Tabel 1 Defenisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Keterangan	Perhitungan
X1	Kemandirian Keuangan (Rasio Kemandirian)	$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Dana Transfer Pemerintah Pusat}} \times 100 \%$
X2	Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat (Rasio Ketergantungan) 1	$\frac{\text{DAU}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100 \%$
X3	Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat (Rasio Ketergantungan) 2	$\frac{\text{DAK}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100 \%$
Y	Rasio Keserasian Belanja	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Pengujian hipotesis pendapatan asli daerah dengan belanja modal menunjukkan nilai  $t_{hitung} -2,972 < t_{tabel} 1,708$  atau nilai signifikan  $0,004 < 0,05$ ; hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal; artinya alokasi Pendapatan Asli Daerah untuk Belanja Modal kurang mendapat porsi; sementara menurut Iqbal dan Halim (2012). bahwa sebuah daerah diberikan otonomi mengatur keuangannya sendiri untuk membangun daerahnya sampai di daerah yang paling terpencil sekalipun. Belanja modal adalah dana yang digunakan untuk pembangunan secara fisik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sampai di daerah terpencil.

Kenyataan di masyarakat bahwa pemerintahan pada periode yang bersangkutan dinilai berhasil jika pembangunan secara fisik nampak dan masyarakat menikmatinya. Oleh karena itu penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu diperhatikan juga alokasi belanja modal. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu tolak ukur pemerintah daerah dalam melihat kemandirian daerahnya. Keberadaannya ditengah masyarakat yang mengharuskan kreatifitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya sehingga ada kontribusinya dalam pembangunan secara berkelanjutan.

.Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari sumber-sumber kekayaan dalam wilayah atau daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberian

pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga semakin besar Pendapatan Asli daerah maka akan semakin besar pula kontribusi daerah pada Belanja Modal yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Hasil regresi tidak mendukung hipotesis pertama pada penelitian ini artinya hipotesis pertama ditolak artinya pemerintah daerah harus lebih memperhatikan pengalokasian Pendapatan Asli Daerah yang untuk belanja modal; karena Pendapatan Asli Daerah merupakan gambaran suatu kondisi kemampuan keuangan daerah dalam mendorong pembangunan secara fisik atau infrastruktur daerahnya; dengan adanya infrastruktur yang menunjang maka pembangunan yang lain akan turut meningkat pada gilirannya pendapatan asli daerah pasti ikut naik (Anjani,2015).

### 3.2. Pengaruh Dana berimbang dari alokasi umum terhadap Belanja Modal

Pengujian hipotesis variabel Dana Berimbang dari alokasi umum dengan Belanja Modal diperoleh nilai  $t_{hitung} -0,641 < t_{tabel} 1,708$  atau nilai signifikan  $0,523 > 0,05$ ; hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa Dana Berimbang dari alokasi umum tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan; artinya sumber pendapatan dari Dana Berimbang yaitu alokasi umum kurang mendapat porsi untuk pembangunan secara fisik melalui Belanja Modal. Menurut Bagjana,2021) Dana Berimbang dari alokasi umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan sebagai bentuk pemerataan kemampuan keuangan daerah atas pembiayaan keperluan wilayah dan pengeluarannya sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Provinsi Papua yang mendapatkan Dana Berimbang dari alokasi umum yang nilainya besar namun diperuntukkan untuk Belanja Modal masih rendah karena Dana Berimbang alokasi umum banyak digunakan untuk belanja operasional sehingga kontribusinya terhadap belanja modal masih rendah.

### 3.3 Pengaruh Dana berimbang dari alokasi khusus terhadap Belanja Modal

Pengujian hipotesis variabel Dana Berimbang dari alokasi khusus menunjukkan nilai  $t_{hitung} 2,295 > t_{tabel}$  atau nilai signifikan  $0,024 < 0,05$ ; hasil pengujian hipotesis Dana Berimbang dari alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal; artinya Dana Berimbang dari alokasi khusus untuk Belanja Modal mendapat porsi cukup besar sehingga berpengaruh terhadap Belanja Modal. Menurut Bagjana (2021) Dana Berimbang dari alokasi khusus berperan penting terhadap dinamika pelayanan dasar di wilayah sesuai dengan dasar desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas untuk layanan dasar masyarakat yang sudah beralih ke Pemerintahan di daerah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua mendapat Dana Berimbang dari alokasi khusus cukup besar sehingga semakin besar pula kontribusinya terhadap Belanja Modal yang digunakan untuk



pembangunan secara fisik di Pemerintahan Kabupaten dan Kota Propinsi Papua yang dapat dinikmati manfaatnya bagi masyarakat seluruhnya.

#### 3.4. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana berimbang dari alokasi umum dan alokasi khusus terhadap belanja modal

Pengujian hipotesis secara silmultan menunjukkan nilai  $t_{hitung} 6,498 > t_{tabel} 2,76$  dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ ; Hasil uji simultan ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua; artinya jika hanya diambil satu sumber untuk Belanja Modal maka tidak akan cukup maka untuk Belanja Modal diperlukan dari semua sumber pendapat sehingga Belanja Modal terpenuhi.. Dengan demikian memberikan manfaat bagi masyarakat.dari hasil pembangunan sarana dan prasarana, yang dapat menunjang kegiatan perekonomian bagi masyarakat, pada gilirannya kesejahteraan masyarakat juga pasti akan meningkat. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat diharapkan akan diikuti pula peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah di ungkapkan diatas maka dapat di simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. artinya alokasi sumber keuangan dari Pendapatan Asli Daerah kurang mendapat porsi untuk Belanja Modal sehingga pembangunan secara fisik kurang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat secara umum.

Dana Berimbang dari alokasi umum tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. artinya sumber keuangan dari Dana Berimbang alokasi umum untuk Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Propinsis Papua yang digunakan untuk Belanja Modal belum maximal sehingga kurang nampak hasil pemangunan yang dinikmati oleh masyarakat pada umumnya.

Dana Berimbang alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. artinya sumber keuangan dari Dana Berimbang alokasi khusus digunakan untuk pembangunan secara fisik mendapat alokasi yang cukup besar sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten dan Kota Propinsi Papua.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Berimbang alokasi umum, dan alokasi khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, artinya sumber keuangan untuk pembangunan secara fisik dapat dilaksanakan dengan berhasil jika sumber keuangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten dan Kota Propinsi Papua berasal dari beberapa sumber pemasukan yakni sumber pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah, dan dari Dana Berimbang alokasi umum dan alokasi khusus.

## 5. Daftar Pustaka

- Haryanto, Sahmuddin dan Arifuddin, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Arif Bahtiar, Muclis dan Iskandar, 2009, Akuntansi Pemerintahan, Jakarta, @kademia
- Sujarweni Wiratna V., 2015 Akuntansi Sektor Publik, Teori Konsep Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Baru Press
- Halim Abdul dan Iqbal Muhammad, 2012, Pengelolaan Keuangan Daerah, Yogyakarta, UPP STIM YKPN
- Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta
- Bagjana, 2021, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Konsep dan Implementasi), Bandung, Yrama Widya
- Sugiyono, 2016, Statistika untuk Penelitian, Bandung, Alfabeta Bandung
- Prasetyo Bambang dan Jannah Miftahul Lina, 2013, Metode Penelitian Kuntitatif Teori dan Aplikasi, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada
- Indraswari, A. F. P., Romdioni, A. N., & Asrudi. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi. *Papsel Economic Journal*, 1(1), 1–17. Retrieved from <https://journal.papsel.org/index.php/PEJ/article/view/1>
- Anjani, E. S. (2016, Maret). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemda Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 10 No 1 Hal 1-10.
- Riskiyaniti, V., & Ilham, M. (2024). Pengaruh Program Samsat Delivery (Samdey) Dan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Merauke. *Musamus Accounting Journal*, 6(1), 23-30. <https://doi.org/10.35724/maj.v6i1.5707>